

Judul : Bansos dicabut, warga miskin kena imbas judi online
Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bansos Dicabut

Warga Miskin Kena Imbas Judi Online

PENCORETAN 200 ribu Kepala Keluarga (KK) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) karena terindikasi bermain judi online (judol) menuai sorotan tajam dari DPR. Anggota Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bertindak hati-hati dan transparan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat miskin yang tidak tahu apa-apa rekeningnya disalahgunakan pihak lain malah dicoret dari bansos. Ini justru menyusahkan," tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

Politikus PDIP itu menekankan, Kemensos perlu menjelaskan secara menyeluruh dan terbuka dasar pencoretan tersebut. Dikhawatirkan ada rekening yang digunakan secara tidak sah oleh pihak lain atau bahkan data fiktif.

"Harus ada penjelasan komprehensif agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama mereka yang benar-benar berhak menerima bansos," ujar Abidin.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratomoko menyebut, pencoretan ini langkah tepat untuk menjaga akurasi penyaluran bansos. Namun,

perlu kehati-hatian dan keadilan dalam prosesnya.

"Proses pencabutan harus akurat, tidak diskriminatif dan tidak salah sasaran," kata Singgih.

Dia juga menyoroti pentingnya edukasi dan pencegahan terhadap bahaya judi online. Maraknya judol sudah menjadi persoalan moral dan agama yang bisa mendorong masyarakat miskin mengabaikan kebutuhan pokoknya.

"Pemerintah harus membuka lapangan kerja dan mempermudah akses usaha agar masyarakat tidak tergoda pada ilusi kaya dari judol," tambahnya.

Singgih juga meminta Pemerintah memperhatikan dampak sosial dari pencoretan tersebut. Jangan sampai mereka yang dicoret justru makin jatuh ke jurang kemiskinan. Harus ada alternatif solusi.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menilai, langkah pencoretan tidak bisa dilakukan secara reaktif dan sepihak. Harus ada pendekatan yang adil dan manusiawi.

"Edukasi keuangan dan pembinaan lebih dulu sebelum mencoret hak bansos mereka," ujarnya.

Selly mengingatkan, sebagian masyarakat miskin bisa terjerat judol karena desakan ekonomi, bukan karena gaya hidup. ■